

IPMLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Sahida *, ²⁾Muhammad Nur, ³⁾Erfina

^{1), 2), 3)} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

¹⁾sahida19821107@gmail.com, ²⁾m.nurcokro@gmail.com,

³⁾erfinafisip.05@gmail.com

*sahida19821107@gmail.com

Abstrak

Kehidupan masyarakat desa saat ini masih ditandai dengan banyaknya keluarga yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga perlu bantuan pemerintah melalui bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan dokumen. Informan penelitian berjumlah enam orang, ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data diolah menggunakan bantuan software Nvivo 12, analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kulo telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, PKH

Abstract

The current life of rural communities is still marked by a significant number of families struggling to meet their daily needs, requiring government support through social assistance. This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Kulo Village, Sidenreng Rappang Regency, as well as to examine the supporting and inhibiting factors affecting the implementation of PKH in the area. This research employs a qualitative approach with a descriptive research type. Data were collected using interviews, observations, and document analysis. Six informants were selected through purposive sampling. The data were processed using Nvivo 12

software, and the analysis followed an interactive model consisting of data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The findings show that the Family Hope Program (PKH) in Kulo Village has contributed to improving access to education and healthcare for Beneficiary Families (KPM).

Keywords: Policy implementation, PKH

PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat adalah dengan meluncurkan berbagai program bantuan sosial pemerintah. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan sosial yang sifatnya bersyarat. PKH ditujukan bagi keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak termasuk bagi mereka yang menyandang disabilitas atau cacat hingga mereka yang tergolong usia lanjut untuk menggunakan sarana pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, gizi dan perawatan serta pendampingan (Kemensos RI, 2024). Pemerintah Indonesia berkomitmen menjadikan PKH menjadi pusat keunggulan penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya mengingat jumlah penduduk miskin indonesia masih tinggi.

Kondisi penduduk Indonesia masih menunjukkan adanya peningkatan kemiskinan di desa-desa.. Data akyual dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,23 persen, sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen. Menurut BPJS, garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar Rp.550.458,-kapita/bulan, sedangkan rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia mempunyai 4,71 orang anggota rumah tangga. BPS juga mencatat besarnya Garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.592.657,-/rumah tangga miskin/perbulan (BPJS, 2024).

Implementasi PKH dalam perkembangannya diklaim telah mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia, menurunkan kesenjangan serta meningkatkan indeks pembangunan Manusia (IPM). Klaim pemerintah tersebut mengacu kepada hasil riset yang menunjukkan PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, Program Keluarga Harapan sukses meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di indonesia mencapai 4,8 persen (Kemensos, 2024). Dalam perkembangan implementasi PKH di beberapa wilayah menunjukkan adanya berbagai permasalahan antara lain target penerima bantuan tidak tepat sasaran, rendahnya motivasi KPM melakukan graduasi mandiri, pendistribusian bantuan yang tidak tepat waktu dan minimnya kesadaran KPM untuk konsisten dalam menjalankan persyaratan program seperti rutin mengunjungi fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan (Nasution et al., 2023).

Terkait dengan implementasi PKH, beberapa penelitian terdahulu antara lain penelitian Heni dkk menyimpulkan kekurangan dalam implementasi PKH yaitu ada warga yang memenuhi syarat sebagai penerima PKH namun tidak menerima dan masalah penyaluran dana yang selalu terlambat (Heni Susanti et al., 2022). Penelitian lain menunjukkan kelemahan dalam implementasi PKH adalah kurangnya koordinasi antara kepala desa dan masyarakat, kelemahan PKH di adalah sasaran program kurang tepat karena data tidak valid, 21,54 persen penerima PKH bukan orang miskin (Sofianto, 2020). Hasil kajian Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI (2015), menemukan bahwa PKH secara umum kurang efektif. Berdasarkan data lapangan di Jakarta ditemukan bahwa 68% penerima PKH hanya menggunakan sebagian saja untuk pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu diusulkan kajian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan bantuan PKH kurang efektif (Sofianto, 2020).

Desa Kulo adalah salah satu desa di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengimplementasi Program Keluarga Harapan. Sejak program PKH berjalan sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat penerima PKH terutama dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH masih ditemukan kelemahan. Permasalahan yang terjadi seperti masyarakat penerima PKH belum memahami dengan baik hak dan kewajibannya, pelaksanaan sosialisasi yang kurang sehingga masyarakat penerima program PKH kurang mendapat penjelasan sepenuhnya. Masalah lain adalah dana bantuan PKH digunakan untuk keperluan sehari-hari lainnya akibat pencairan dana PKH yang sering terlambat. Permasalahan lainnya adalah adanya warga desa keberatan karena merasa memenuhi kriteria sebagai penerima PKH namun tidak penerima PKH. (wawancara dengan pendamping PKH, 22 Juli 2024).

Penelitian terhadap implementasi PKH di Desa Kulo menjadi urgen disebabkan Desa Kulo salah satu desa pelaksanaan Program Keluarga Harapan namun masih terdapat kelemahan. Pertimbangan lainnya adalah bahwa dengan melakukan penelitian di Desa Kulo dapat diketahui bagaimana implementasi program PKH, apa yang menjadi hambatan sehingga dapat memberikan rekomendasi penyempurnaan PKH di Desa Kulo.

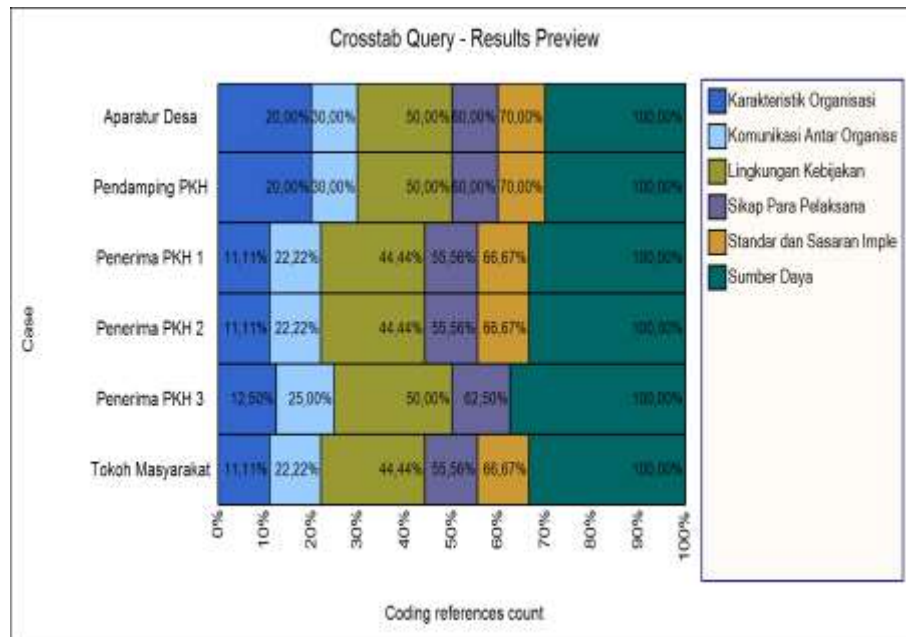
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dipilih berdasarkan pertimbangan agar dapat dijelaskan secara mendalam fenomena implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang sifatnya kompleks. Selain itu juga didasarkan pertimbangan dapat mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial (Creswell, 2010). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan dokumen. Informan penelitian berjumlah enam orang, ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga yang terpilih adalah orang yang memahami masalah penelitian (Sugiyono, 2018). Data diolah menggunakan bantuan software Nvivo 12, analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang

Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut ini hasil koding data Nvivo.



Gambar 1. Hasil Coding Wawancara Nvivo

Berdasarkan gambar 1. di atas menunjukkan bahwa Grafik crosstab yang dihasilkan dari coding Nvivo ini menampilkan distribusi referensi coding berdasarkan kategori tema yang diterapkan pada berbagai kasus, yang mencakup Aparatur Desa, Pendamping PKH, Penerima PKH 1-3, dan Tokoh Masyarakat. Berbagai warna yang digunakan mewakili berbagai kategori atau tema, yaitu: Karakteristik Organisasi, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Kebijakan, Sikap Para Pelaksana, Standar dan Sasaran Implementasi, serta Sumber Daya.

Persentase distribusi untuk setiap kategori dalam kasus tertentu menunjukkan seberapa sering tema tersebut muncul dalam data yang telah dikumpulkan untuk kasus-kasus yang bersangkutan. Hasil ini menunjukkan adanya variasi dalam distribusi tema pada masing-masing kasus. Misalnya, Aparatur Desa memiliki persentase tertinggi pada kategori Sumber Daya dengan nilai 100%, diikuti oleh Lingkungan Kebijakan dan Sikap Para Pelaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa isu terkait sumber daya sangat dominan dalam konteks Aparatur Desa, sedangkan untuk Pendamping PKH, terdapat keseimbangan antara tema Komunikasi Antar Organisasi dan Sumber Daya.

Ini menunjukkan pentingnya komunikasi serta ketersediaan sumber daya bagi Pendamping PKH dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Pada Penerima

PKH dan Tokoh Masyarakat, tampak distribusi yang lebih luas di beberapa kategori. Khususnya pada Penerima PKH 1 dan 2, kategori Lingkungan Kebijakan dan Sikap Para Pelaksana menunjukkan persentase yang cukup signifikan, yang mungkin menandakan bahwa penerima PKH lebih sensitif terhadap aspek kebijakan dan sikap para pelaksana dalam penerapan program. Sebagai kesimpulan, hasil ini mencerminkan perbedaan fokus tematik di antara beragam pemangku kepentingan, yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai elemen-elemen penting dalam implementasi program di berbagai kelompok.

Dalam menganalisis implementasi PKH di desa Kulo, digunakan indikator mengacu kepada teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Adapun hasil analisis data setiap indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator Standar dan Sasaran Implementasi.

Narasumber dalam penelitian ini merupakan Kepala Desa Kulo yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai Apakah ada peraturan atau kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kulo ?

“ya, memang ada peraturan atau kebijakan yang mengatur pelaksanaan PKH di Desa Kulo, dan masyarakat Penerima PKH menerima bantuan berdasarkan Kategori atau komponen seperti kategori Lansia”.

Dari hasil wawancara, meskipun aparat desa dan pendamping PKH mengetahui adanya kebijakan yang mendasari pelaksanaan PKH, pemahaman mengenai peraturan ini di kalangan masyarakat umum, terutama di antara penerima manfaat, masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai kebijakan PKH agar para penerima lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam program tersebut.

Pentingnya sosialisasi kebijakan PKH kepada masyarakat, terutama kepada para penerima manfaat, merupakan salah satu faktor utama untuk memastikan keberhasilan program ini. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman penerima manfaat mengenai peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan PKH. Dengan begitu, mereka tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi juga memahami hak dan kewajiban yang terkait dalam program tersebut. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu mereka menghargai bantuan yang diterima serta memanfaatkannya secara bijak. Di samping itu, sosialisasi yang tepat dapat membantu mengurangi kesalahpahaman atau misinformasi di kalangan masyarakat mengenai kriteria dan prosedur pelaksanaan PKH. Sebagai contoh, pemahaman tentang kategori penerima, seperti kategori lansia, akan lebih jelas jika disampaikan melalui sosialisasi yang terarah dan berkelanjutan. Aparatur desa dan pendamping PKH memiliki peran penting dalam menjelaskan informasi ini, karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui situasi lokal secara langsung.

Oleh karena itu, diharapkan adanya sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur dari pihak pemerintah daerah maupun desa, agar masyarakat, khususnya penerima PKH, dapat memahami peran mereka secara penuh dalam program ini. Pemahaman yang lebih baik akan memudahkan proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PKH, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

b. Indikator Sumber Daya

Menurut Narasumber dalam hal ini Kepala Desa Kulo mengatakan :

“ Apabila pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mau menambah Petugas/Pendamping/Pengelola PKH, ya alhamdulillah tetapi pada dasarnya jumlahnya sudah cukup dan mereka memiliki keahlian/kemampuan sesuai yang diharapkan”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas atau pendamping PKH di Desa Kulo dianggap memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Baik aparatur desa maupun penerima manfaat menilai pendamping PKH dapat menjalankan peran dengan efektif, memberikan arahan yang diperlukan, serta mendukung keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kewajiban program.

Keberadaan pendamping PKH yang memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai di Desa Kulo merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Dengan kemampuan yang dimiliki, para pendamping dapat membantu penerima manfaat dalam memahami dan menjalankan kewajiban mereka, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima. Kompetensi ini juga membantu membangun kepercayaan di antara penerima manfaat, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan terbantu dalam mengikuti program.

Di samping itu, meskipun jumlah petugas dianggap sudah mencukupi oleh Kepala Desa Kulo, dukungan dari pemerintah Kabupaten untuk menambah jumlah pendamping PKH akan tetap diterima dengan baik. Penambahan ini, jika diperlukan, dapat meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan dukungan terhadap masyarakat, terutama dalam aspek pemantauan dan pendampingan yang lebih intensif. Dengan adanya pendamping tambahan, cakupan layanan bisa menjadi lebih merata dan menjangkau setiap penerima manfaat secara lebih pribadi dan komprehensif.

Oleh karena itu, meskipun sumber daya manusia yang ada dianggap cukup memadai, potensi peningkatan kapasitas dalam hal jumlah dan kualitas pendamping bisa menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya ini akan semakin memperkuat pelaksanaan PKH di Desa Kulo dan memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif

serta memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

c. Indikator Karakteristik Organisasi

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa Desa Kulo tidak memiliki struktur organisasi formal untuk PKH. Pelaksanaan PKH dilakukan tanpa struktur organisasi khusus, dengan pendamping menjalankan tugas berdasarkan penugasan langsung tanpa dukungan susunan organisasi resmi. Ketiadaan struktur organisasi formal untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kulo menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini masih bersifat informal. Program ini mengandalkan penugasan langsung kepada pendamping tanpa adanya organisasi yang khusus dibentuk untuk mengatur pelaksanaannya. Hal ini berarti tidak ada koordinasi formal atau rantai komando yang jelas dalam pelaksanaan PKH di tingkat desa.

Keadaan ini bisa menjadi kendala dalam hal efisiensi dan akuntabilitas program. Meskipun pendamping sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan, ketiadaan struktur organisasi dapat membatasi efektivitas koordinasi dan pembagian tanggung jawab secara resmi. Tanpa adanya struktur organisasi, pendamping PKH harus mengandalkan inisiatif pribadi dan arahan dari atas. Mereka melakukannya tanpa bimbingan atau dukungan dari susunan organisasi yang jelas. Situasi ini dapat menyulitkan dalam memastikan keseragaman pelaksanaan program di lapangan. Terdapat pula ketidakadaan mekanisme formal untuk mengatasi masalah atau memberikan solusi jika ada kendala dalam pelaksanaan.

Selain itu, ketiadaan struktur organisasi formal juga dapat mengurangi peluang untuk monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan program. Dengan demikian, pembentukan struktur organisasi formal untuk PKH di Desa Kulo bisa menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah desa atau kabupaten. Struktur yang jelas dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dengan menetapkan peran dan tanggung jawab yang lebih tegas. Selain itu, struktur juga dapat menciptakan jalur komunikasi yang lebih teratur antara pendamping, aparatur desa, dan pemerintah kabupaten. Adanya struktur organisasi formal ini juga dapat mendukung keberlanjutan program. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi penerima manfaat di desa.

d. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Narasumber dari Kepala Desa Kulo menyatakan bahwa :

“ya komunikasi Pendamping PKH dengan Aparatur Desa cukup baik mereka sering melakukan koordinasi setiap akan melaksanakan sosialisasi pada penerima bantuan PKH”.

Dari hasil wawancara, seluruh informan menilai bahwa koordinasi dan komunikasi antar organisasi dengan para pelaksana PKH sudah berjalan dengan sangat baik. Penggunaan grup WhatsApp menjadi salah satu sarana utama yang mendukung efektivitas komunikasi, sehingga informasi terkait program dapat disampaikan dengan cepat dan tepat kepada seluruh pihak terkait. Narasumberdari Pendamping PKH memaparkan bahwa :

Mereka Melaksanakan Sosialisasi P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) setiap bulan dan dalam satu Desa terdapat 2 sampai 3 kelompok.

Komunikasi yang baik antara pendamping PKH dan aparatur Desa Kulo merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan pelaksanaan program ini. Koordinasi yang baik memungkinkan pendamping dan aparatur desa untuk menyusun serta melaksanakan sosialisasi kepada penerima manfaat dengan lebih terencana. Pendamping PKH dapat memberikan informasi mengenai program, menjelaskan hak dan kewajiban penerima, serta menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, tujuan program PKH akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Penggunaan grup WhatsApp sebagai media komunikasi juga meningkatkan efektivitas koordinasi antar organisasi. Melalui platform ini, pendamping dan aparatur desa dapat berbagi informasi secara real-time. Ini memastikan bahwa setiap perkembangan atau perubahan terkait program PKH segera diketahui oleh semua pihak terkait. Hal ini meminimalisir kesalahan informasi dan memungkinkan respons yang lebih cepat dalam menangani permasalahan atau kebutuhan yang muncul di lapangan. Keberadaan grup WhatsApp ini juga memudahkan pelaksana untuk menjaga kesinambungan komunikasi tanpa perlu bertatap muka langsung, sehingga waktu dan sumber daya dapat dihemat. Selain itu, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan secara rutin setiap bulan menunjukkan komitmen pendamping PKH dalam meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat.

Di dalam satu desa, dibentuk 2 sampai 3 kelompok P2K2 untuk memaksimalkan interaksi dan diskusi antara pendamping dan keluarga penerima manfaat. Pertemuan ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai wadah bagi penerima PKH untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Pada akhirnya, hal ini dapat memperkuat ikatan sosial dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama.

e. Lingkungan Kebijakan

Masyarakat umum di Desa Kulo sepenuhnya mendukung Program Keluarga Harapan. Dukungan ini terutama didasari oleh manfaat nyata PKH dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan keluarga di desa. Penerima PKH kategori SMP menyebutkan bahwa :

“bantuan dari PKH sangat membantu keluarganya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Ia sangat mendukung program ini agar dapat terus dilaksanakan”

Lingkungan kebijakan di Desa Kulo sangat mendukung keberlanjutan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dukungan masyarakat terhadap PKH menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya program ini dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Dengan adanya PKH, banyak keluarga merasa terbantu, terutama dalam mengurangi beban biaya pendidikan anak-anak mereka. Hal ini memungkinkan pendidikan menjadi lebih accessible bagi lebih banyak anak di desa tersebut.

Dukungan dari penerima PKH yang berasal dari berbagai kategori pendidikan, seperti SD dan SMP, juga menjadi indikator bahwa manfaat PKH dirasakan di berbagai kalangan. Penerima manfaat tidak hanya merasakan dampak langsung dari bantuan ini, tetapi juga mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam terhadap program tersebut. Ucapan terima kasih dari penerima manfaat menunjukkan betapa pentingnya program ini bagi kesejahteraan keluarga mereka dan harapan agar PKH dapat terus dilaksanakan untuk membantu generasi mendatang dalam memperoleh pendidikan yang layak.

f. Sikap Para Pelaksana

Pelaksana dan pendamping PKH menunjukkan sikap yang sangat mendukung program PKH tersebut. Semua informan, yang terdiri dari kepala desa, pendamping PKH, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat, sepakat bahwa pelaksana dan instansi terkait memberikan motivasi serta bimbingan secara konsisten kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping PKH bahkan memberikan arahan agar bantuan dapat digunakan secara produktif, misalnya untuk pendidikan anak dan peningkatan kesejahteraan keluarga selain itu, untuk memudahkan proses pencairan dana bantuan tersebut, Pendamping PKH mengambil inisiatif dengan memakai Pihak Ketiga yang dinamakan Agen.

Para pelaksana, khususnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung kesuksesan program ini di Desa Kulo. Mereka tidak hanya melaksanakan tugas sesuai dengan arahan, namun juga secara aktif memberikan motivasi dan bimbingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima oleh keluarga digunakan dengan tepat, seperti untuk keperluan pendidikan anak atau peningkatan kesejahteraan keluarga. Pendamping PKH berperan sebagai mentor yang membantu keluarga memahami pentingnya pemanfaatan bantuan secara produktif untuk masa depan mereka.

Selain memberikan bimbingan langsung, pendamping PKH juga berusaha untuk mempermudah akses bagi KPM dalam menerima bantuan. Salah satu inisiatif yang diambil adalah dengan melibatkan pihak ketiga atau

Agen dalam proses pencairan dana. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan proses bagi KPM, sehingga mereka dapat mengakses bantuan tanpa mengalami kendala teknis atau administratif yang mungkin menyulitkan. Penggunaan Agen ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas pendamping dalam menjawab kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa proses pencairan berjalan lancar dan efisien.

Sikap proaktif dari pelaksana PKH ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk kepala desa, tokoh masyarakat, dan para penerima manfaat. Semua pihak mengakui pentingnya dukungan dan inisiatif yang diberikan oleh pendamping PKH, yang tidak hanya memudahkan penerima dalam memperoleh bantuan, tetapi juga memberikan arahan yang dapat mengubah kehidupan keluarga penerima secara positif. Sikap ini mencerminkan dedikasi yang tinggi serta kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga program PKH dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi penerima manfaat. Adapun alasan Pendamping PKH menggunakan Jasa Agen sebagai berikut :

1. Supaya Penerima bantuan PKH tidak antri di Bank
2. Untuk menghindari ATM terblokir karena salah Password
3. Lokasi untuk Penerima bantuan PKH terjangkau
4. Proses pencairan dana berjalan lancar.

Penggunaan jasa Agen oleh Pendamping PKH didasarkan pada beberapa alasan yang sangat relevan dengan kebutuhan penerima manfaat di Desa Kulo. Pertama, dengan adanya Agen, penerima bantuan PKH tidak perlu mengantri di bank, yang dapat menjadi kendala, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas atau waktu. Ini mempermudah akses mereka terhadap dana bantuan tanpa harus menunggu lama di bank, sehingga proses pencairan dana menjadi lebih praktis dan efisien.

Alasan kedua terkait dengan risiko teknis yang mungkin dihadapi oleh penerima manfaat, seperti terblokirnya kartu ATM karena salah memasukkan password. Bagi sebagian penerima yang tidak terbiasa menggunakan ATM, kesalahan seperti ini bisa saja terjadi dan menyebabkan penundaan dalam akses dana bantuan. Dengan bantuan Agen, mereka dapat menghindari masalah ini, karena proses pencairan dilakukan dengan bantuan pihak yang lebih berpengalaman dalam menangani transaksi tersebut.

Selain itu, Agen dipilih karena lokasinya yang lebih mudah dijangkau oleh penerima PKH, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari fasilitas perbankan. Dengan lokasi yang lebih dekat dan terjangkau, penerima bantuan tidak perlu melakukan perjalanan jauh, sehingga akses terhadap bantuan menjadi lebih nyaman dan cepat. Secara keseluruhan, penggunaan jasa Agen oleh pendamping PKH memastikan proses pencairan berjalan lancar, tanpa kendala yang dapat menghambat penerima manfaat dalam memperoleh hak mereka.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor-faktor Pendukung dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kulo sebagai berikut.

a. Dukungan Komunikasi yang Baik

Salah satu faktor pendorong utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kulo adalah komunikasi yang baik antara pendamping PKH dan aparat desa. Koordinasi yang efektif, terutama dalam penggunaan teknologi seperti grup WhatsApp, telah memungkinkan aliran informasi yang cepat dan tepat. Hal ini mendukung terciptanya sinergi antara semua pihak terkait, sehingga sosialisasi program dapat dilakukan dengan lebih efektif dan penerima manfaat lebih memahami hak dan kewajiban mereka.

b. Keterampilan Pendamping yang Kompeten

Keberadaan pendamping PKH yang memiliki keahlian dan kemampuan memadai menjadi faktor lain yang mendukung implementasi program tersebut. Pendamping tidak hanya bertugas memberikan informasi, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Komitmen mereka yang tinggi terhadap program ikut serta memperkuat pelaksanaan PKH di lapangan.

c. Proses Pencairan Dana yang Efisien

Penggunaan jasa Agen dalam proses pencairan dana PKH juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Dengan adanya Agen, penerima manfaat dapat mengakses dana bantuan tanpa harus menunggu di bank, serta menghindari kendala teknis seperti kartu ATM terblokir. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi penerima manfaat yang secara langsung terkait dengan keberhasilan program.

d. Lingkungan Kebijakan yang Mendukung

Lingkungan kebijakan yang mendukung juga memiliki peran penting dalam suksesnya pelaksanaan PKH. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang manfaat program ini, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, menunjukkan bahwa PKH dianggap sebagai solusi nyata untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga. Dukungan ini menciptakan iklim positif yang memfasilitasi kelangsungan program.

Adapun faktor-faktor penghambat implementasi PKH di Desa Kulo meliputi:

a. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi yang Terstruktur

Ketiadaan mekanisme formal untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan PKH juga menjadi faktor yang menghambat. Tanpa adanya sistem yang solid untuk memantau kemajuan dan dampak program, sulit untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa program dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.

b. Terbatasnya Sumber Daya pendamping

Kendati terdapat pendamping yang kompeten, terbatasnya jumlah pendamping di Desa Kulo dapat menjadi penghambat dalam implementasi

PKH. Jumlah pendamping yang tidak cukup dapat mengurangi frekuensi dan kualitas interaksi pendamping dengan penerima manfaat. Pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif menjadi sulit dilakukan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pencapaian sasaran program dan efektivitas manfaat yang diterima.

c. Pemahaman Masyarakat yang Terbatas

Meskipun aparat desa dan pendamping PKH memiliki pemahaman yang memadai tentang kebijakan PKH, masih ada batasan dalam pengetahuan masyarakat umum, terutama penerima manfaat. Kekurangan pemahaman ini dapat mengakibatkan penerima manfaat tidak sepenuhnya memanfaatkan bantuan yang diberikan, serta berpotensi munculnya kesalahpahaman mengenai kriteria dan prosedur yang harus diikuti. Sosialisasi yang kurang efektif tentu akan menjadi penghalang signifikan dalam penerapan program.

d. Ketiadaan Struktur Organisasi Formal

Meskipun terdapat faktor pendukung, ketiadaan struktur organisasi formal untuk mengatur pelaksanaan PKH di Desa Kulo menjadi hambatan tersendiri. Tanpa adanya struktur yang jelas, koordinasi antar pendamping menjadi kurang efisien, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program. Kondisi ini dapat mempersulit distribusi tanggung jawab dan mengurangi akuntabilitas setiap individu dalam menjalankan tugas mereka.

Menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat ini, penting bagi seluruh pihak, baik pemerintah desa maupun kabupaten, untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pelaksanaan PKH. Upaya untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan membentuk struktur organisasi yang jelas harus menjadi prioritas. Selain itu, dukungan lebih dalam bentuk sumber daya dan monitoring serta evaluasi terstruktur dapat memperkuat pelaksanaan program agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif akan menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dari Program Keluarga Harapan di Desa Kulo.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kulo menunjukkan bahwa kebijakan ini secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Target sasaran sudah tepat demikian pula pendistribusian bantuan sudah sesuai aturan. Namun, terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat yang menerima manfaat mengenai hak dan kewajiban mereka. Banyak dari penerima bantuan masih belum sepenuhnya memahami tujuan jangka panjang PKH yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga dan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan intensitas sosialisasi dan bimbingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penerima manfaat memahami dan memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan PKH di Desa Kulo. Antara lain adalah adanya komunikasi yang efektif antara pendamping PKH dan aparatur desa, terutama melalui grup WhatsApp yang mempermudah penyebaran informasi. Di samping itu, dukungan dari masyarakat dan keterampilan yang dimiliki oleh pendamping PKH juga sangat berperan dalam keberhasilan program ini. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang utama dalam pelaksanaan PKH, yaitu tidak adanya struktur organisasi formal untuk program ini di tingkat desa dan terbatasnya jumlah pendamping. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas pendampingan dan pengawasan program.

REFERENSI

- Abizal, N., & Yulindawati, D. (n.d.). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). *JIBES: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis Volume 1, NO. 1, 2022*BPJS, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Adam, C., Hurka, S., Knill, C., Peters, B. G., & Steinebach, Y. (2019). Introducing Vertical Policy Coordination to Comparative Policy Analysis: The Missing Link between Policy Production and Implementation. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 21(5), 499–517. <https://doi.org/10.1080/13876988.2019.1599161>
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Heni Susanti, D., Raja Ali Haji, M., & Maritim Raja Ali Haji Farida Hani Sri Wahyuni Universitas Maritim Raja Ali Haji, U. (2022). Implementasi Kebijakan Pkh Dalam Rangka Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Rowokangkung Dimasa Pandemi Dastin Pratiwi. In *JHPIS*) (Vol. 1, Issue 2).
- Jopang. 2013. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Kendari*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar
- Kemensos, 2024. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Muhammad Nur. 2023. Organisasi dan manajemen. Deepublish Digital. Yogyakarta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1143334>
- Muhammad Nur, Nilwana A, Irwin Hatibu. 2022. Kinerja Pegawai dalam Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

PRAJA| Volume 10 | Nomor 2 | Edisi Juni 2022.
<https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/653>

Nasution, C., Kgs. M. Sobri, Azhar, & Abdul Najib. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan*. 12(4), 1374–1388.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10076>

Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38.
<https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>

Permensos.2001.*Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*.

Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 324–333. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.3455>

Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1).
<https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>

Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publi. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2018. *Metode Peneliti*